

Vaksinasi Tiga Pilar Bagi Mahasiswa Unwidha



KR-Sri Warsiti

Kapolres Klaten mengecek pelaksanaan vaksinasi di Unwidha.

KLATEN (KR) - Sekitar 400 mahasiswa Universitas Widya Dharma (Unwidha) Klaten, mengikuti vaksinasi dalam program Serbuan Vaksinasi Tiga Pilar (TNI-Pemkab Klaten-Polri) yang diselenggarakan di Kampus Unwidha, Kamis (30/9). Rektor Unwidha Prof Dr Triyono mengemukakan, Unwidha dijadikan sentra untuk melakukan vaksinasi dengan target 2.000 dosis, untuk dosis pertama. Selain itu, juga terdaftar masyarakat dari 8 kelurahan di Kecamatan Klaten Utara, yang belum ter-vaksin. Jumlahnya mencapai 11.000. Untuk mengikuti vaksinasi di Kampus Unwidha, sistemnya tidak mendaftar lebih dahulu, melainkan langsung bisa datang. "Info dari Wakil Rektor III, dari mahasiswa sekitar 400 orang. Khususnya mahasiswa baru. Mereka sudah lulus SMA/SMK bulan April, sehingga kalau sekarang di sekolah itu ada vaksin, mereka kan sudah tidak bisa ikut vaksin di sana, jadi difasilitasi vaksin di kampus," kata Triyono.

Kapolres Klaten AKBP Eko Prasetyo saat mengecek vaksinasi di Unwidha, mengemukakan vaksinasi di Kampus Unwidha untuk mengakomodir mahasiswa yang belum ter-vaksin. Ada sekitar 400 mahasiswa yang belum ter-vaksin. Dikarenakan di pagi hari masih proses pembelajaran, maka vaksinasi baru dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Selain mahasiswa, targetnya masyarakat sekitar kampus. Mereka sudah diundang sekitar 500 hingga 700 orang, sehingga target vaksinasi di kampus Unwidha sekitar 1.000 orang.

Selain di kampus Unwidha, jajaran Polres Klaten juga melakukan Serbuan Vaksinasi dengan sasaran pelajar usia 12 tahun ke atas. "Selama satu minggu, sasaran Polres Klaten menysir anak usia 12 tahun ke atas. Hingga Sabtu, sebanyak 40.358 orang. Kumulatif dari hari Senin hingga sabtu. Sudah terjadwal semua, ada beberapa tempat sekolah yang kita pakai untuk kegiatan vaksinasi," jelas Eko Prasetyo.

Eko Prasetyo menilai antusias masyarakat sangat tinggi, dan stok vaksin untuk Kabupaten Klaten sangat mencukupi. iYang terpenting bagi masyarakat yang belum vaksin silahkan datang di gerai-gerai vaksin, baik yang dilaksanakan di tingkat Puskesmas, desa, maupun sekolahan yang ada di Klaten," jelasnya. **(Sit)**

Mentan Kukuhkan Kampung Singkong

SALATIGA (KR) - Kampung Argowiyoto, Kelurahan Ledok, Salatiga dikukuhkan sebagai Kampung Singkong oleh Menteri Pertanian, Syhrl Yasin Limpo secara virtual dari Yogyakarta, Kamis (30/9). Pengukuhan diikuti Walikota Salatiga Yuliyanto, Wakil Walikota Muh Haris dan Forkopimda Salatiga. Keberadaan Kampung Singkong di Salatiga juga mendapat dukungan penuh dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jateng dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng dan Kementerian Pertanian. Kegiatan ini sebagai upaya untuk mendorong optimalisasi potensi singkong sekaligus menggerakkan roda perekonomian dari para pelaku UMKM di Salatiga.

"Alhamdulillah kita mendapat dukungan penuh atas inovasi dan potensi singkong yang kita miliki. Wilayah ini dikukuhkan menjadi Kampung Singkong agar bisa menjadi daya ungkit perekonomian karena mampu mengembangkan potensi yang ada di daerah sehingga kesejahteraan masyarakat bisa meningkat," kata Walikota Salatiga Yuliyanto, usai membuka kegiatan tersebut di Dukuh Ngaglik Kelurahan Ledok, Kecamatan Argomulyo, Salatiga, Kamis (30/9).

Data di tahun 2020, kebutuhan singkong yang di produksi di Salatiga mencapai 638,10 ton. Saat ini masyarakat Salatiga mulai berinovasi pada pengembangan dan pengolahan singkong. Pengolahan tersebar di empat kelurahan, masing-masing Kelurahan Kauman Kidul Kecamatan Sidorejo, Kelurahan Sidorejo Kidul Kecamatan Tingkir, Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo dengan, dan yang terbanyak di Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo dengan produksi 8 ton/hari.

"Produksi singkong yang di Kelurahan Ledok dioptimalkan oleh 32 UMKM, dimana melalui UMKM dan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 110 orang, dengan kebutuhan singkong 6 ton per harinya. Olahan singkong yang dihasilkan pun sudah sampai 23 varian olahan. Sementara untuk inovasi varian singkong dari Salatiga sudah mencapai 150 varian olahan," jelas Yuliyanto. **(Sus)**

Warga Lereng Merapi Gelar Merti Desa

BOYOLALI (KR) - Sebagai bentuk melestarikan budaya Jawa, warga desa di lereng Gunung Merapi tepatnya di Desa Sumur, Kecamatan Tamansari, Boyolali, Rabu (30/9) sore, menggelar merti desa atau selamatan desa di balai desa setempat. Kepala Desa Sumur Siti Prihatin, mengutarakan merti desa sebagai bentuk *nguri-uri* atau melestarikan budaya Jawa sekaligus selamatan. Dimana, pandemi-19 belum berakhir. "Di masa pandemi Covid-19 warga ada yang terpapar virus korona, namun tidak sampai ada kematian," katanya kepada wartawan di balai desa. Dikatakan, saat merti desa tersebut mengirab tumpeng gunung yang terbuat dari hasil bumi, seperti terong, wortel, singkong, ketela, jeruk dan jagung. Selain mengadakan gunungan juga ada seni Warogkan,tarian kas lereng Merapi. Kegiatan seperti ini dilakukan setiap satu tahun sekali sehabis panen. Pihaknya berharap, semoga pandemi segera berakhir, sehingga kegiatan masyarakat kembali normal dan anak anak sekolah kembali belajar di sekolah. **(M-2)**



KR-Mulyawan

Topeng ireng mengarak tumpeng gunung dari hasil bumi fibawa menuju Balai Desa Sumur.

DPRD dan Bupati Grobogan Setujui APBD Perubahan 2021



GEMA DPRD KAB. GROBOGAN



GROBOGAN (KR) - DPRD Grobogan menyetujui dan menyepakati Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2021 dalam rapat paripurna ke-40 DPRD Grobogan, Jumat pekan lalu. Persetujuan tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani pimpinan DPRD yang diwakili Wakil Ketua DPRD Ir HM Nurwibowo MSi, bersama Bupati Grobogan Hj Sri Sumarni SH MM, disaksikan Wabup Grobogan dr Bambang Pujiyanto MKes.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Grobogan Ir HM Nurwibowo MSi itu dihadiri secara virtual oleh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekda beserta para Asisten Sekda, para Staf Ahli Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretaris DPRD, dan para direktur dan pimpinan BUMD setempat.

Dalam sambutannya, bu-

pati mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan, khususnya kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Grobogan atas kerja sama yang terjalin baik selama ini, sehingga proses pembahasan dapat berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan bersama.

"Menenai saran, pendapat maupun masukan yang telah disampaikan, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, akan saya pergunakan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan guna keberhasilan pelaksanaan tugas ke depan," ujarnya.

Dijelaskan, berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, mengamanatkan bah-

wa, setelah persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Penjabaran APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021, beserta kelengkapan dokumen lainnya, akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dilakukan evaluasi.

"Tujuan diadakan evaluasi, agar tercapai keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan, sehingga hasil evaluasi tersebut dimungkinkan terdapat saran, masukan, koreksi maupun hal lainnya yang kesemuanya

bertujuan untuk kesempurnaan Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021," terangnya.

Dalam Raperda Perubahan APBD Grobogan 2021, pendapatan daerah sebesar Rp 2.565.020.198.721, yang semula Rp 2.565.297.167.501. Yaitu terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 346.675.272.708, pendapatan transfer Rp 2.069.596.566.013, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 148.748.360.000. Kemudian belanja daerah sebesar Rp 2.594.895.125.721, yang semula Rp 2.595.172.094.501.

Terdiri dari belanja operasi Rp 1.839.375.333.779, belanja modal sebesar Rp 309.394.709.005, belanja tidak terduga sebesar Rp 24.030.686.913, dan belanja transfer sebesar Rp 422.094.396.024.

Selanjutnya, pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 103.184.864.000, dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 73.309.937.000. Sehingga pembiayaan netto surplus sebesar Rp 29.874.927.000. Selanjutnya sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) daerah setelah pembiayaan netto sebesar Rp 0 atau nol rupiah. **(Tas)**



KR-M Taslim

Bupati Grobogan bersama DPRD menandatangani persetujuan APBD Perubahan 2021 disaksikan Wabup Grobogan.

DI TENGAH PANDEMI COVID-19

KKP Jangan ‘Mencekik’ Nelayan

SEMARANG (KR) - Anggota Komisi B DPRD Jateng Setia Budi Wibowo meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk meninjau ulang Kepmen KP no 86 dan 87 tahun 2021, tentang kenaikan pungutan hasil perikanan (PHP) dan penerimaan negara bukan pajak (PNPB).

Keputusan tersebut dinilai mencekik nelayan apalagi ditengah pandemi. Demikian ditegaskan anggota Komisi B DPRD Jateng Setia Budi Wibowo kepada warttawan di Semarang Kamis (29/9). Sikap Budi Wibowo dari FPKS ini merupakan respons dari aksi unjuk rasa dari nelayan dan pengusaha

ha perikanan di Pati yang menolak Kepmen KP no 86 dan 87 tahun 2021, tentang kenaikan PHP dan PNPB.

Nelayan menolak pene-naan jenis dan tarif yang tertuang dalam Pasal 2 Ayat (4) PP 85/2021 yang diberlakukan untuk pra produksi, pasca produksi dan penarikan dengan sistem kontrak. kemudian

dalam pasal 20 disebutkan juga bahwa ada pungutan 10 persen dari hasil penjualan ikan. "Pemerintah kurang peka dalam membuat kebijakan sektor kelautan dan perikanan. Di sektor lainnya mendapatkan relaksasi dari pemerintah karena pandemi, pada sektor kelautan perikanan malah dikenai pajak baru berupa kenaikan pungtan hasil perikanan," Tegas Wibowo.

Menurutnya peraturan tersebut pasti akan membe-ratkan nelayan dalam melaut karena biaya operasional yang cukup tinggi.

Nelayan yang mengan-dalkan laut sebagai mat-apencahariannya, justru oleh pemerintah dibebani dengan berbagai pungutan yang tinggi. Ini sama saja dengan membunuh para nelayan tersebut secara perlahan.

Politikus Partai Keadilan sejahtera (PKS) ini minta kepada nelayan agar mengajukan judicial review terkait putusan kepada Mahkamah Konstitusi (MK), karena PP tersebut telah ditetapkan. Budi Wibowo mendesak kepada KKP untuk meninjau ulang Kepmen KP no 86 dan 87

tahun 2021. Peraturan baru tersebut dianggap landasan kebijakannya tidak adil, karena dasar dari kebijakan ini adalah menyamaratakan harga patokan ikan di seluruh wilayah Indonesia. Padahal kebutuhan serta hasil tangkapannya berbeda-beda di setiap wilayah.

"Saya minta pemerintah meninjau ulang Kepmen KP no 86 dan 87 tahun 2021 tentang kenaikan PHP dan PNPB. Jangan jadikan menaikkan pendapatan negara bukan pajak sebagai alasan untuk ‘mencekik’ rakyat sendiri," tegas Wibowo. **(Bdi)**

Pangdam dan Kapolda Jateng Safari Vaksinasi

GROBOGAN (KR) - Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Rudianto bersama Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi, Kamis (30/9) mengunjungi Grobogan dan Demak dalam rangka safari per-

cepatan vaksinasi Covid-19. Di Grobogan keduanya mengunjungi Pesantren Man-baul A'la, Kampung Jagalan Purwodadi. Sedangkan di Demak mengunjungi gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia meninjau

vaksinasi terhadap lima ribu warga Demak.

Saat meninjau Pesantren Manbaul Aila, keduanya menyaksikan pelaksanaan vaksinasi 500 santri dan pelajar. Terdapat 300 santri dan pelajar yang mengikuti vaksinasi dosis pertama. Sementara, 200 santri lainnya menerima vaksinasi dosis dua. Tak hanya vaksinasi saja, Kapolda bersama Pangdam IV Diponegoro, didampingi Bupati Grobogan Sri Sumarni juga menyebarkan bantuan sembako kepada para santri. Dalam amanatnya, Irjen Pol Ahmad Lutfi mengatakan, pihaknya memastikan pelaksanaan vaksinasi santri dan pelajar terus dilakukan untuk mengejar

herd immunity target vaksinasi nasional.

"Meskipun Kabupaten Grobogan sekarang sudah level dua, saya berpesan agar masyarakat dalam melakukan aktivitas harus tetap melaksanakan protokol Kesehatan," pinta Ahmad Lutfi. Dijelaskan, percepatan vaksinasi Covid-19 di Jateng adalah sebuah keniscayaan. Mengingat saat ini roda ekonomi mulai bergerak dan masyarakat sudah melaksanakan aktivitas secara normal, meskipun harus dibatasi oleh aturan prokes yang ketat.

"Maka dari itu, pelaksanaan vaksinasi harus di-genjot secara simultan. Pelaksana di lapangan harus sinergis. Pencapaian

yang masih sekitar 28 persen di Grobogan memang masih kurang, tapi saya salut karena progres yang signifikan serta kerjasama antar lembaga cukup bagus," tegas Ahmad Lutfi.

Pangdam Rudiyanto menjabarkan tentang capaian vaksinasi ideal yang harus dicapai agar herd immunity segera terbentuk di Jateng khususnya Semarang Raya. Menurutnya, semua stakeholder harus mengambil langkah-langkah kreatif agar jumlah warga yang ikut vaksinasi meningkat pesat. Untuk Semarang Raya, Pangdam menyoroti jumlah capaian rata-rata yang baru sekitar 55 persen. **(Tas)**



KR-M Taslim

Kapolda Jateng Bersama Pangdam IV Diponegoro meninjau vaksinasi di Gedung IPHI Demak.

Pelaksanaan PTM di Jateng Diapresiasi UNICEF

SEMARANG (KR) - UNICEF mengapresiasi langkah dan upaya diambil Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dalam pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), terutama dalam hal memperhatikan keamanan dan kesehatan siswa, guru maupun orang tua. Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia di Surabaya, Ermi Ndoen usai bertemu dengan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di kantornya, Selasa (28/9). Pertemuan terjadi usai Ganjar Pranowo membaca pernyataan dari WHO dan UNICEF agar anak Indonesia segera memulai PTM.

Ganjar Pranowo mengapresiasi kesigapan UNICEF dalam merespons komunikasi. Karena terkait PTM, Pemprov Jateng memiliki sejumlah syarat yang harus

penuhi sebelum sebuah sekolah menggelar PTM. "Ketika who dan UNICEF menginginkan agar Jawa Tengah segera membuka PTM, saya langsung komunikasi dengan mereka, ini maksud pernyataannya apa, karena kami punya syarat, epidemiologis, vaksin, dan kesiapan prokes yang ada di sekolah. Untuk itu Jateng tidak tergesa-gesa dalam penerapan PTM," ujar Ganjar Pranowo.

Meski demikian, respons cepat dari UNICEF ini disambut baik oleh Ganjar. Pihaknya dengan senang hati menerima masukan dan saran yang diberikan UNICEF. Mulai dari penerapan sistem reward, hingga tawaran aplikasi untuk pengawasan sekolah pelaksanaan PTM. Sebenarnya ada aplikasi yang bisa ditransform. Mereka sudah punya berbasis desa, maka Guber-

nur minta hari ini basisnya sekolahan, sehingga kita bisa cek satu persatu bagaimana pelaksanaannya cara mereka melakukan proses belajar mengajar, dan cukup dengan WA sudah bagus.

Ganjar Pranowo menilai yang terkait dengan sistem penghargaan merupakan ide yang sangat bagus. Dengan reward system tersebut, baik sekolah, siswa maupun guru akan berlomba menjadi percontohan pelaksanaan PTM yang baik di masa pandemi. "Dengan reward sistem tersebut, sekolah yang melanggar ya tidak dapat reward dan sistem ini harapan nanti bisa kita pakai untuk memantau. Langkah lain adalah kita akan melakukan persepatan pelaksanaan vaksinasi untuk pelajar," tandas Ganjar Pranowo.

Ermi Ndoen usai pertemuannya dengan Ganjar mengatakan, sebenarnya pelaksanaan PTM di Jateng sangat bagus dan bisa dijadikan contoh oleh daerah lain, terutama keterlibatan seluruh komponen dalam menciptakan PTM yang sehat dan aman. "UNICEF sangat mengapresiasi lang-

kah-langkah yang diambil oleh pak Gubernur Ganjar Pranowo dan komponen masyarakat di Jateng. Sangat bagus ya, contoh yang baik bagaimana kesiapan pemerintah dalam mendukung terciptanya sekolah yang sehat dan aman untuk kegiatan tatap muka ke depan," kata Ermi. **(Bdi)**



KR-Budiono

Ganjar Pranowo menerima penghargaan dari Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia di Surabaya, Ermi Ndoen.